

**SEJARAH RUNTUHNYA ORDE BARU 1989-1998**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Ilmu Humaniora Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam**

**Penyusun:**

**IING NURFAAIN**

**05120012**

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM  
FAKULTAS ADAB  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ling Nurfaain  
NIM : 05120012  
Jenjang/Jurusan : S1/Sejarah dan Kebudayaan Islam

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 03 Juni 2010

Saya yang menyatakan,



ling Nurfaain  
NIM: 0512012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Iing Nurfaain

Lamp : 3 Eksemplar

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Adab

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Iing Nurfaain

NIM : 05120012

Judul Skripsi : Sejarah Runtuhnya Orde Baru 1989-1998

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Adab Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam sidang munaqasyah.

Dengan ini kami mengharap skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb*

Yogyakarta,

10 Juni 2010 M  
27 Jumadil Akhir 1431 H  
Dosen Pembimbing,



**Badrun Alaena, M.Si**  
NIP.1963111 199203 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA**  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./Fax. (0274) 513949  
Web: <http://adab.uin-suka.ac.id> E-mail: [adabuin-suka.ac.id](mailto:adabuin-suka.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/DA/PP.00.9/ 1411 /2010


Skripsi dengan judul : SEJARAH RUNTUHNYA ORDE BARU 1989 - 1998  
Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IING NURFAAIN  
NIM : 05120012  
Telah dimunaqasyahkan pada : 13 Juli 2010  
Nilai Munaqasyah : B


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

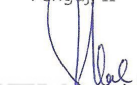
Ketua Sidang

  
**Drs. Badrun, M. Si**  
NIP. 19631116 199203 1 003

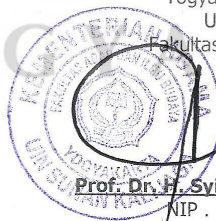
Penguji I

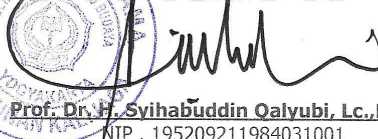
  
**Dr. Hj. Siti Marvam, M. Ag.**  
NIP. 19580117 198503 2 001

Penguji II

  
**Dr. Maharsi, M. Hum**  
NIP. 19711031 200003 1 001

Yogyakarta, 13 Juli 2010  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya  
DEKAN



  
**Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M. Ag.**  
NIP. 195209211984031001

**MOTTO**

**Takut Adalah Mati Berulang-ulang Kali.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Untuk:

Almamaterku Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga;

Ayah, Ibu, dan adikku yang tersayang;

sahabat-sahabatku di Cigaru Mafatihul Huda, Depok Ahsanu' Amala , dan di-  
Ngayogyakarta;

dan siapa saja yang pernah ku kenal.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Penulisan skripsi di latar belakang oleh kegelisahan penulis mengenai sejarah runtuhnya Orde Baru dari tahun 1989-1998 yang berkuasa selama 32 tahun, Dimana dalam perjalanan sejarah Orde Baru dari masa kemasa banyak kejadian-kejadian yang tidak tersingkap dan tetap menjadi rahasia dari rangkaian peristiwa sejarah politik di Indonesia. Namun demikian, ada banyak peristiwa yang menggemparkan dalam sejarah bangsa Indonesia. Salah satu peristiwa tersebut adalah runtuhnya orde baru (ORBA) dan lengsernya Soeharto dari kursi presiden Republik Indonesia setelah tiga puluh dua tahun berkuasa sekaligus dimulainya era reformasi. Disebut menggemparkan karena peristiwa itu banyak memakan korban, mulai dari mahasiswa hingga masyarakat luas. Menggambarkan detik-detik sebelum reformasi terjadi, empat mahasiswa ditembak mati, kerusuhan biadab, dan pembantaian karena anti-Cina, membuat Jakarta menjadi daerah perang dan memaksa Soeharto mengundurkan diri. Penembakan oknum ABRI terhadap beberapa mahasiswa Tri Sakti 12 Mei 1998 telah memicu timbulnya kemarahan seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia kepada ABRI, sehingga citranya rusak di mata dalam negeri, apalagi peluru tajam yang berlumuran darah itu telah merenggut nyawa tidak kurang dari empat orang mahasiswa yang gugur sebagai pahlawan reformasi.

Hal inilah yang memicu segera kejatuhannya Soeharto dari tahta kekuasaannya, tak terbendung lagi “Lengser Keprabon” kemudian menjadi kenyataan. Gugurnya empat orang mahasiswa harapan bangsa itu telah menyebabkan pula nama Universitas Tri Sakti menjadi sangat termasur ke seluruh penjuru dunia.



## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد سيد المرسلين  
الله وصحابته أجمعين صلاة وسلاما دائما إلى يوم الدين وعلى

Segala puji hanya milik Allah s.w.t., Tuhan yang selalu memberi nikmat terhadap hamba-hamba-Nya, yang berupa dapat berusaha dan berfikir, terutama kepada penulis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Muhammad s.a.w., Nabi terakhir yang kita harapkan *syafâ'ah* dan pertolongannya di hari akhir kelak.

Skripsi yang berjudul “Sejarah runtuhnya Orde Baru 1989-1998” ini merupakan upaya penulis untuk melacak akar konflik di Indonesia apa saja yang menyebabkan runtuhnya Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Dalam proses penelitian hingga penulisannya menjadi (dapat dikatakan) skripsi, penulis merasa berhutang budi, pemikiran, dan tenaga dari banyak pihak.

Orang yang pertama pantas mendapatkan penghargaan dan ucapan terimakasih adalah Drs. Badrun A, M.Si. yang bertindak sebagai Dosen Pembimbing. Di tengah kesibukannya yang cukup tinggi, beliau masih menyempatkan waktu untuk memberi pengarahan dan bimbingan serta mengoreksi tulisan skripsi penulis. Ketelitiannya dalam mengoreksi tata bahasa bahkan tanda baca merupakan pelajaran tersendiri yang sangat berharga bagi penulis. Oleh karena itu, tiada kata yang pantas diucapkan selain terima kasih disertai do'a semoga jerih payahnya mendapat balasan yang setimpal di sisi-Nya.

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Dekan Fakultas Adab beserta staf-stafnya, Ketua Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Drs Musa M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik, dan seluruh dosen di Jurusan SKI yang namanya tidak disebutkan satu-persatu. Banyak ilmu, pengalaman dan pelajaran yang penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa di jurusan SKI. Kalian telah merekonstruksi penulis dan menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bak samudra yang sangat luas tak bertepi, dan penulis dipinggir pantai sambil memegang gelas dan berisi hanya setetes air pengetahuan.



Ucapan terima kasih juga patut diberikan kepada teman-teman mahasiswa di Jogja, khususnya teman-teman Kordiska 2006-2007, teman-teman Kordiska 2006-2007 dan mahasiswa SKI angkatan 2005. Beberapa orang yang namanya perlu disebut antara lain: Ihab habudin S.Hi M. Sholahuddin S.Hum, M. Misbahudin M.Hum dan M. Nashir S.Hum , keempatnya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga; Saepul Rosid, Aris Wanto, Muhammad Nur santoso, Zakariya Ahmad dan Eko Faisal Yusuf merupakan teman-teman sejawat; Andi Dewi Purnama, Hindun S.Th, Ari (Pentol), Osmon S.E, Sobahul Mubarak S.E, Nanang Nugraha, Sulis S.E. teman kos. dengan kebersamaan, celotehan, dan senda gurau mereka selama ini menjadi inspirasi dan tenaga tersendiri bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan banyak terima kasih diberikan kepada Heny Nur Aeni yang telah memberikan cambuk semangat untuk mempercepat menyelesaikan skripsi untuk menjalin hubungan yang lebih jauh lagi. sehingga menjadi pelecut semangatku. Oleh karena itu, tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih, semoga dirimu dapat menjadi pendampingku yang nurut. Amin

Rasa hormat dan terima kasih disampaikan kepada kedua orang tua, yang telah membesarkan, mendidik, dan mengenalkan kepada penulis tentang arti sebuah kehidupan. Dengan doa dan restu dari orang tua, penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kepada adik penulis, Rudi Hermawan dan Wulan Lujeng Lestari Putri, yang saat ini sedang belajar penulis mendoakan agar semoga diberi kemudahan dalam memahami dan menelaah pelajaran di Sekolah.

Dengan bantuan dan dukungan berbagai pihak, penulisan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Saran dan Kritik yang membangun sangat diharapkan.

Yogyakarta, 03 Juni 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Landasan Teori .....	10
F. Metodologi Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II SEJARAH SINGKAT ORDE BARU</b> .....	<b>21</b>
A. Periode Awal (1965-1975) .....	21
B. Periode Keemasan (1976-1988) .....	30
C. Periode Kemunduran dan Keruntuhan (1989-1998) .....	39
<b>BAB III DINAMIKA POLITIK ISLAM PADA MASA ORDE BARU</b> .....	<b>42</b>
A. Dinamika Partai Politik Islam Masa Orde Baru .....	43
1. Dinamika Partai Politik Islam Pasca Revolusi .....	44
2. Dinamika Partai Politik Islam Masa Orde Baru .....	50
B. Dinamika Intelektual Muslim Masa Orde Baru.....	65
1. Intelektual Muslim Masa Pra-Kemerdekaan Dan Pasca Revolusi .....	66
2. Intelektual Muslim Masa Orde Baru .....	73

<b>BAB IV KERUNTUHAN ORDE BARU .....</b>	<b>86</b>
A. Faktor-faktor Penyebab Runtuhnya Orde Baru .....	86
1. Faktor Ekonomi .....	86
2. Faktor Politik .....	95
a. Kuatnya Gelombang Aksi Massa dan Mahasiswa .....	101
1) Kelompok Mahasiswa Radikal-Militan .....	105
2) Kelompok Senat Mahasiswa .....	108
3) Kelompok Mahasiswa Muslim .....	111
b. Dukungan Elemen-Elemen Kelas Menengah .....	117
c. Keretakan di Kalangan Elit Soeharto .....	122
1) Melemahnya Dukungan Kelompok “Garis Keras” .....	123
2) Hilangnya Dukungan Kelompok Oportunis .....	126
d. Gagalnya “Kompromi Agung” .....	130
3. Faktor Disintegrasi Bangsa .....	133
B. Keruntuhan Orde Baru dalam Kerangka Teori Sosial Konflik .....	138
C. Peran Agama Islam dalam Keruntuhan Orde Baru .....	140
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	142
B. Saran-saran .....	144
DAFTAR PUSTAKA .....	145
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	149
DAFTAR RIWAYAT.....	156

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Orde Baru merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Soeharto di Indonesia. Sebagai istilah, Orde Baru digunakan untuk membedakan (antitesa) dari Orde Lama (masa pemerintahan Soekarno). Antitesa ini muncul dari pandangan Orde Baru terhadap Orde Lama sebagai sesuatu yang menyimpang dan menjadikannya titik tolak pelarian, legitimasi, serta kutukan. Suasana psiko-politik yang menjadikan Orde lama sebagai masa penuh penyimpangan, telah menjadi bantalan kecemasan (*anxiety*) yang mempengaruhi watak Orde Baru. Segala sesuatu yang berbau Orde Lama diberangus dan tidak layak dipublikasikan, sehingga banyak terjadi pemblackklisan terhadap para simpatisan Orde Lama. Banyak kalangan yang menyesalkan sikap psiko-politik semacam ini. Terlebih lagi, aktualisasi kembali ke masa lalu tersebut, dalam skenario perkembangan Orde Baru, kerap dijadikan sebagai ajang perhatian, di mana kecemasan kekanak-kanakan, kemajuan egosentris (berpusat), dan insting memamatkan memperoleh akar dan pembedarannya.<sup>1</sup>

Pembakuan istilah Orde Baru sebenarnya ditegaskan oleh Soeharto sendiri sebagaimana dikutip oleh Virginia Matheson Hooker bahwa: “Orde Baru tidak

---

<sup>1</sup> Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (ed.), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 24-25.

lain adalah tatanan kehidupan rakyat, bangsa dan Negara yang kita letakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.” Di dalam kesempatan lain Soeharto juga mengatakan bahwa, “Orde Baru lahir sebagai ketetapan hati kita untuk mengoreksi segala macam penyimpangan dari cita-cita proklamasi.”<sup>2</sup> Dengan demikian, menurut penulis, dari sisi politik kekuasaan, pembakuan nama “Orde Baru” tidak hanya untuk membedakannya dengan “Orde Lama” melainkan juga sebagai langkah Soeharto untuk semakin menancapkan kekuasaannya.

Menurut catatan sejarah, secara umum, masa Orde Baru dapat dibagi atas tiga periode, yaitu: masa awal, masa perkembangan atau kejayaan, dan masa penurunan atau kejatuhan.<sup>3</sup> Pada masa awal, Soeharto sebagai aktor utama Orde Baru berkonsentrasi pada pemulihan ekonomi yang sempat terabaikan pada masa Soekarno. Soeharto juga berusaha menciptakan ‘stabilitas’ keamanan. Lawan-lawan politiknya mulai disingkirkan. PKI dibubarkan, orang-orang yang dicurigai menjadi anggotanya dibantai yang jumlahnya diperkirakan mencapai 400 sampai satu juta orang. Tindakan represif juga dilakukan terhadap pers, mahasiswa, maupun kelompok masyarakat yang melakukan kritik pada kebijakan pemerintah. Selain itu, Soeharto mulai

---

<sup>2</sup> Virginia Matheson Hooker, “Bahasa dan Pergeseran Kekuasaan di Indonesia: Sorotan terhadap Pembakuan Bahasa Orde Baru,” dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (ed.), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 24-25.

<sup>3</sup> Pembagian masa orde baru ini didasarkan pada pendapat Asvi Warman Adam, salah satu sejarawan terkemuka Indonesia. Lihat uraian singkat tiga periode Orde Baru tersebut dalam Asvi Warman Adam, *Soeharto File: Sisi Gelap Sejarah Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2006), hlm. x-xxiii.

merangkul berbagai kalangan untuk makin mengukuhkan kekuasaannya, seperti fraksi militer atau intelijen dan para ekonom Universitas Indonesia.

Dalam studi sejarahnya Ricklefs menyebutkan bahwa Orde Baru (1965-1975) telah menyulut berbagai kontroversi. Di satu pihak Soeharto dipuji karena mampu membasmi PKI dan mengadopsi kebijakan yang pro Barat, sedang di pihak lain dicibir karena kedua kebijakan tersebut akan meruntuhkan dirinya sendiri. Dengan demikian, Soeharto, dipuji atas prestasi ekonominya, tapi dikutuk akibat catatan buruknya dalam bidang hak asasi manusia dan korupsi yang mulai menjadi penyakit akut pemerintahannya.<sup>4</sup>

Pada masa perkembangan atau kejayaan Orde Baru, Soeharto telah berhasil mengumpulkan seluruh kekuasaan di tangannya. Soeharto tidak hanya mengangkat menteri sebagai pembantunya, tetapi seluruh jajaran eksekutif seperti gubernur, walikota, bupati, bahkan gubernur Bank Indonesia harus mendapat restu darinya. Hal ini tidak hanya dilakukannya dalam bidang birokrasi saja tetapi juga dalam bidang organisasi sosial lainnya pun juga demikian, sehingga pola kekuasaannya cenderung sentralistik. Hasilnya bisa ditebak, kalangan-kalangan tersebut tak mampu berbuat banyak dan cenderung pasif karena menunggu petunjuk dari atasan. Kalaupun ada yang berani menentang, mereka disisihkan atau dibredel.

Muramnya dunia politik ini diiringi dengan berbagai laporan statistik ekonomi Indonesia yang tampak menunjukkan grafik kemajuan. Bapak

---

<sup>4</sup> M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004*, alih bahasa oleh Satrio Wahono, Bakar Bifagih, Hasan Huda, Miftah Helmi, Joko Sutrisno, Has Manadi, F. X. Dono Sunardi, dan Haris Priyatna. (Jakarta: Serambi, 2008), hlm. 558-654.



pembangunan untuk Soeharto pun mulai disematkan. Meski prestasi ini banyak mendapat pujian, namun seperti banyak diungkapkan berbagai pakar, kebijakan Soeharto ini hanyalah keberhasilan sesaat untuk menuju pada kondisi Indonesia yang lebih buruk. Ambisi Soeharto dalam mengukuhkan kekuasaannya dengan menumbalkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara telah ikut menjeruskan negara ini pada krisis multidimensional. Meski dalam dunia internasional, waktu itu Indonesia dipuji lantaran menjadi pemimpin ASEAN yang cukup disegani.

Pada periode ketiga, yaitu masa penurunan atau kejatuhan. Rezim Orde Baru mulai diterpa berbagai persoalan yang sangat serius, mulai akibat dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme hingga krisis ekonomi pada tahun 1997. Kondisi sosial politik yang memburuk, seperti konflik antar etnis mulai merebak di berbagai daerah juga memperkeruh masa akhir pemerintahan Soeharto. Selain itu, munculnya 'suara-suara' kritis dari berbagai kalangan, seperti cendekiawan muslim, politisi, dan mahasiswa ikut mengiringi masa kejatuhan Soeharto. Hal ini diakhiri dengan peristiwa yang tidak diprediksi sebelumnya, Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998.

Dari pembabakan sejarah Orde Baru tersebut, muncul sebuah kegelisahan akademik dalam benak penulis tentang apa yang menyebabkan Orde Baru runtuh? Siapa aktor-aktor dibalik jatuhnya Soeharto? Pertanyaan ini sudah mengelayut dalam alam pikiran penulis, sehingga membutuhkan jawaban-jawaban akademis pula. Kegelisahan yang dirasakan oleh penulis juga menimpa banyak kalangan. Terlebih, kita sering mendengar ungkapan



Soeharto dalam berbagai kesempatan, sebagaimana diungkapkan oleh James Luhulima, bahwa Soeharto selalu menegaskan bahwa ia tidak pernah setengah-setengah dalam mengemban tanggung jawab. “Melepaskan jabatan presiden di tengah jalan, itu bersifat setengah-setengah dan bisa berarti pula sebagai pelanggaran terhadap UUD 1945, yang menetapkan masa pertanggungjawaban presiden lima tahun,” demikian itu, ia ungkapkan dalam dialog santainya dengan sekitar 150 anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Bina Graha, 12 Maret 1994. Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam rapat Paripurna MPR, 11 Maret 1998. Saat itu, Soeharto mengatakan, “Insya Allah, lima tahun nanti, saya akan berdiri di mimbar ini untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepemimpinan saya di hadapan wakil-wakil rakyat Indonesia.”<sup>5</sup>

Adalah wajar apabila banyak kalangan kaget ketika Soeharto mundur dari Jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia, jabatan yang digenggamnya selama 32 tahun. Banyak pengamat yang tidak menduga bila Orde Baru yang sudah bertahan lebih dari 30 tahun itu akan jatuh hanya digoyang dalam beberapa pekan. Banyak pakar politik yang tidak mengerti, penguasa yang baru saja diangkat akan merelakan kekuasaannya runtuh dan digantikan.

Segala misteri yang melingkupi peristiwa tersebut telah menarik minat penulis untuk melakukan penelitian seputar runtuhnya Orde Baru. Bagi Penulis, peristiwa runtuhnya Orde Baru tidak hanya berarti sebagai babakan

---

<sup>5</sup> James Luhulima, *Hari-hari Terpanjang: Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto dan Beberapa Peristiwa Terkait*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 13.

peristiwa yang terpisah dalam perjalanan bangsa ini. Sebagai fakta sejarah, runtuhnya Orde Baru adalah peristiwa yang bisa kita pelajari dan dijadikan refleksi untuk menyongsong kehidupan bangsa ini menjadi bangsa yang tangguh. Hal ini terkait dengan urgensi dari sejarah itu sendiri yang salah satu nilai positifnya adalah dengan mendalami sejarah seseorang mampu memperoleh pelajaran dari sebuah peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, beberapa masalah perlu diangkat terkait sejarah runtuhnya Orde Baru. Hal ini tidak hanya dimaksudkan sebagai inventarisasi persoalan-persoalan sejarah, melainkan juga mencari kebenaran sejarah itu sendiri, sehingga sejarah sebagai sebuah fakta merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi, tidak ada istilah “kebohongan sejarah” di dalamnya

#### **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Adapun alasan mengapa penulis melakukan penelitian dari tahun 1989 karena di tahun 1989 telah mulai terjadi kegoncangan politik Orde Baru yang mengguncang stabilitas politik. Terlebih Islam sebagai kekuatan politik mulai terbangun sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Oleh karena itu sejak tahun 1989-an telah mulai pergeseran arah politik nasional yang berkembang. Dengan demikian, dapat dikatakan sejak saat itu peta politik Orde Baru mulai berubah, sedangkan tahun 1998 secara historis rezim Orde Baru dinyatakan tumbang bersamaan dengan pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden RI yang ke II pada tanggal 21 Mei 1998.

Rumusan masalah yang dapat diajukan kerangka penelitian ini, sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan Orde Baru runtuh?
2. Bagaimana dinamika politik Islam yang berkembang saat itu dan apakah agama (Islam) berperan besar dalam peristiwa kejatuhan Orde Baru?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

Karya ini diharapkan bisa memberikan referensi baru bagi pembaca, tidak hanya dalam kelengkapan koleksi kepastakaan melainkan juga mampu secara utuh menyuguhkan kepastian dan kejernihan dalam setiap kebijakan yang meliputi; pikiran, ucapan dan tindakan bagi generasi-generasi penerus di masa mendatang, bahwa semua itu memerlukan sikap reformis (perubahan) dan akomodasi (penyelesaian) untuk bisa diterima oleh lingkungan.

Adapun kegunaannya :

1. Untuk dijadikan bahan penelitian selanjutnya.
2. Untuk memberikan sumbangsih dalam bentuk karya ilmiah bagi disiplin ilmu sejarah.
3. Untuk menambah pengetahuan.
4. Sebagai perangsang bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang serupa.

### **D. Tinjauan Pustaka.**

Penulisan sejarah tentang keruntuhan Orde Baru 1989-1998 tampak menarik untuk di kaji. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tulisan-tulisan yang muncul terkait tema tersebut, baik yang ditulis oleh penulis lokal

maupun asing. Beberapa karya penelitian dalam bahasa asing pun sudah banyak di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Namun yang perlu di catat bahwa dari sekian banyak karya tentang keruntuhan Orde Baru masih terbatas.

Terdapat beberapa karya tulis seputar Orde Baru, yaitu: *pertama*, buku yang ditulis oleh Retowati Abdulgani-KNAP, *Soeharto The Life Legacy Of Indonesia's Second President* terj. Zamira Lubis (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007)<sup>6</sup>. Dalam kajian tersebut dipaparkan perjalanan hidup Soeharto dari sebuah desa kecil di Kemusuk Yogyakarta tempat soeharto dilahirkan hingga menjadi Presiden. Perjalanan hidup itu mempengaruhi corak kepemimpinan dia sebagai Presiden.

*Kedua*, buku yang ditulis oleh Eep Saefulloh Fatah yang berjudul, *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru: Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional*.<sup>7</sup> Buku ini berisi tentang “nasib” demokrasi pada masa Orde Baru. Beberapa isu yang diangkat adalah kepemimpinan politik, regionalism dan demokrasi, Hak Asasi Manusia, peningkatan keadilan sosial pada masa Orde Baru. Sesuai dengan judulnya, buku ini menyoroti ironi politik Orde Baru yang dipandang “menghianati” nilai-nilai demokrasi, seperti kasus diberlakukannya Dwi Fungsi ABRI,

---

<sup>6</sup> Retowati Abdulgani-KNAP, *Soeharto The Life Legacy Of Indonesia's Second President*, terj. Zamira Lubis (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007)

<sup>7</sup> Eef Saefulloh Fatah, *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru: Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional*. (Bandung: Rosda Karya, 2000).

sistem kepartaian yang hegemoni, serta pemanfaatan organisasi Islam semacam ICMI untuk menopang kekuasaan Orde Baru.

*Ketiga* skripsi yang di tulis oleh Raden Jamal judul *Demokrasi Pada Masa Orde Baru Dalam Konteks Statifikasi Sosial Masyarakat Jawa*<sup>8</sup>, tulisan ini mengenai tentang kekuasaan terakumulasi dan terpusat pada seorang eksekutif serta tidak terdistribusikan kepada kekuatan-kekuatan politik alternatif. Penguasa memposisikan dirinya sebagai *patronage* sedangkan rakyat disini di posisikan sebagai pihak tergantung pada penguasa *client*.

*Keempat*, skripsi yang di tulis oleh Warnoto dengan judul *Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi komparasi Era Orde lama, Orde baru, dan reformasi)*<sup>9</sup>. Fokus utama skripsi ini adalah menemukan persamaan dan perbedaan kebijakan (*policy*) dalam pembangunan hukum nasional di era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Skripsi tersebut membandingkan kondisi politik dengan indikasi, peranan politik, lembaga perwakilan, kebebasan pers, dan peranan pemerintah.

Buku lain yang layak untuk disebut adalah *Politik Demi Tuhan; Nasionalisme Relijius di Indonesia*.<sup>10</sup> Buku yang memuat berbagai tulisan mengenai masalah-masalah perpolitikan dan bernegara di Indonesia, dalam karya borongan tersebut menguraikan berbagai aspek mulai dari diskursus

---

<sup>8</sup> Raden Jamal, "Demokrasi Pada Masa Orde Baru Dalam Konteks Statifikasi Sosial Masyarakat Jawa," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuludin UIN Yogyakarta 2003.

<sup>9</sup> Warnoto, "Politik Hukum Islam Di Indonesia (Studi Komparasi Era, Orde Lama, dan Reformasi)," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Yogyakarta 2007.

<sup>10</sup> Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan; Nasionalisme Relijius di Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).

agama, politik, dan kebudayaan. Oleh karenanya karya ini memuat dengan sekilas mengenai Orde Baru sehingga kurang mendalam pembahasannya.

Buku *Soeharto File; Sisi Gelam Sejarah Indonesia*<sup>11</sup> memuat kegagalan Soeharto dalam memimpin negeri ini. Banyak kabut gelap yang diungkap dalam buku ini, namun dalam karyanya, ia kurang menguraikan dengan rinci mengenai sejarah berdirinya Orde Baru sehingga terkesan hanya memenuhi syarat penulisan sejarah, yaitu kronologis.

Dari tinjauan pustaka di atas dapat diketahui bahwa sejauh penelusuran Penulis, kajian tentang sejarah runtuhnya Orde Baru masih terbatas dan membutuhkan banyak referensi. Kiranya, dengan penelitian ini dapat memperkaya khazanah sejarah Indonesia secara umum atau sejarah runtuhnya Orde Baru secara khusus.

#### **E. Landasan Teori**

Segala aspek yang terkait dengan sejarah runtuhnya Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari konteks *sosial-politik* yang berkembang saat itu. Oleh karena itu, runtuhnya Orde Baru sebenarnya merupakan peristiwa yang diakibatkan oleh pergerakan situasi sosial-politik di tanah air. Konstruksi sosial dan benturan antar kepentingan yang terbentuk misalnya, telah menghasilkan berbagai peristiwa terjadi, termasuk tumbanganya Soeharto dari kursi Presiden sekaligus mengakhiri masa rezim Orde Baru, sehingga meneliti sejarah runtuhnya Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari perspektif sosiologi politik.

---

<sup>11</sup> Asvi Warman Adam, *Buku Soeharto File; Sisi Gelam Sejarah Indonesia* (Jakarta: Ombak, 2006).



Secara sederhana, sosiologi berkaitan dengan masalah-masalah hubungan antar manusia. Prilaku manusia dipengaruhi oleh kelompok tempat di mana ia terlibat sebagai anggota dan oleh interaksi yang terjadi dalam kelompok itu. Sementara politik berkaitan dengan hubungan antar manusia, terutama yang menyangkut masalah hubungan kekuasaan. Pada dasawarsa 1950-an, ilmu politik lebih banyak memberi perhatian pada masalah lembaga pemerintah (lembaga kepresidenan, kabinet birokrasi, administrasi negara, Dewan Perwakilan Rakyat, partai politik, dan sebagainya). Sesudah itu politik lebih diarahkan pada studi prilaku manusia dalam kehidupan politik. Perubahan ini sering disebut dengan masa revolusi “*behavioral*.”<sup>12</sup>

Meskipun demikian, aliran pemikiran ini tidak membuang lembaga-lembaga politik formal, melainkan hanya menggeser tekanan lebih besar pada prilaku individu atau kelompok sebagai unit analisa. Pendekatan ilmu politik semacam ini meyakini adanya saling keterkaitan antara setiap cabang ilmu sosial. Prilaku seseorang dinilai berkaitan dengan prilakunya dalam bidang-bidang lain dalam sejarah hidupnya. Oleh karena itu, secara sosial-politik, untuk mengetahui tindakan politik seorang warga negara, harus diketahui perilaku orang tersebut secara umum.<sup>13</sup>

Terdapat lima perspektif teoritis yang selama ini berkembang dalam studi sosiologi politik, yaitu perspektif fungsionalis struktural, konflik, kelas, elites,

---

<sup>12</sup> Mohtar Mas' oed, dan Nasikun, *Sosiologi Politik*, (Yogyakarta: PAU-Studi Sosial Universitas Gajah Mada, 1987), hlm. 1.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 1-2.



dan pluralis.<sup>14</sup> Dari kelima perspektif tersebut, yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif konflik atau dalam teori-teori sosial disebut juga dengan teori *sosial-konflik*.<sup>15</sup>

Berbeda dengan perspektif *struktural-fungsionalis* yang meyakini bahwa masyarakat adalah terdiri dari bagian-bagian (yaitu unit-unit sosial) yang saling bergantung dan terpadu, yang mengarah pada keselarasan dan pemenuhan sistem sosial, serta dipadukan oleh suatu konsensus atau kesepakatan nilai-nilai bersama, dalam perspektif *sosial-konflik* masyarakat dipandang bukan sebagai suatu sistem yang bulat terpadu melainkan suatu sistem sosial yang penuh dengan perbedaan, ketidaksepakatan, konflik atau pertikaian. Masyarakat dipadukan bukan oleh suatu nilai, melainkan oleh daya paksa. Apabila teori *strukturalis-fungsional* menganggap stabilitas dan kesepakatan nilai sebagai persyaratan pokok bagi berfungsinya sistem sosial, maka dalam sosial-konflik, perubahan sosial dan ketidaksepakatan dianggap sebagai segi paling penting dalam dinamika kehidupan masyarakat. Tanpa perbedaan, konflik, dan perubahan sosial, kehidupan masyarakat tidak akan berkembang dan bermakna. Pendeknya, masyarakat adalah medan persaingan dan konflik.

Dalam konteks Negara, perspektif *sosial-konflik* melihat Negara sebagai alat yang punya daya paksa yang digunakan oleh penguasa untuk membuat

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>15</sup> Dalam sosiologi dikenal beberapa gugusan teori besar, dua diantaranya adalah teori struktural-fungsional dan sosial konflik. Selain teori ini, sebenarnya masih ada teori-teori lain, seperti teori exchange, interactionist, dan teori fenomenologi. Lihat, Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 56.

masyarakat tunduk padanya. Negara adalah perpanjangan tangan penguasa.<sup>16</sup> Negara, baik berupa lingkup atau kekuatannya, dijadikan tameng untuk membuat kelompok-kelompok lain dalam masyarakat patuh, diam, tidak kritis dan melawan.

Stratifikasi atau pelapisan sosial, yang oleh kalangan *struktural-fungsionalis* sebagai sistem pengintegrasi masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan stabilitas sosial. Menurut teori *sosial-konflik*, justeru disebut sebagai penghalang integrasi sosial dan merupakan sumber utama konflik yang terjadi dalam masyarakat.<sup>17</sup> Atas nama stratifikasi, sumber-sumber penghidupan masyarakat didistribusikan secara tidak merata. Ada yang mendapat bagian banyak, sedikit, bahkan tidak kebagian. Hal inilah yang menyebabkan ketimpangan, kesenjangan, serta konflik.

Selain itu, percaturan politik dipandang sebagai kegiatan yang berkaitan dengan kekuasaan. Politik merupakan upaya dan cara-cara seseorang memperoleh kekuasaan. Politik adalah arena salah satu kelompok untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Tidak peduli kelompok lain rugi. Oleh karena itu, dunia riil politik dipandang sebagai arena bagi siapa menang siapa kalah, siapa memperoleh siapa kehilangan.

Inilah ide-ide pokok dari teori *sosial-konflik*. Teori yang sering dikaitkan dengan filsafat Aristotelian, para filosof materialisme, seperti Thomas Hobbes, Niccolo Machiavelli, Charles Darwin, Karl Marx dan Ralf Dahrendorf. Hobbes misalnya, meyakini bahwa semua makhluk hidup termasuk manusia,

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

terbentuk dari substansi dan materi. Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*). Sifat dasarnya manusia adalah untuk memenuhi egonya. Oleh karena itu wajar bila kehidupan masyarakat penuh dominasi dan penindasan. Hal ini sejalan dengan konsep Machiavelli dan Darwin. Menurut Machiavelli, manusia mempunyai sifat dasar, yaitu rakus, penipu, dan tidak ada rasa belas kasih, akibat terbatasnya kapasitas manusia untuk mencapai tujuannya karena keterbatasan sumber daya ekonomi. Hasilnya, masyarakat adalah komunitas yang sarat dengan konflik. Tentang hal ini Darwin sebutan sendiri, yaitu *the survival of the fittest*. Artinya, manusia adalah makhluk yang berkompetisi untuk menyelamatkan hidupnya.<sup>18</sup>

Karl Marx, tokoh yang telah mengembangkan teori *sosial-konflik* secara sistematis mengatakan bahwa konflik dalam masyarakat bersumber dari aktivitas ekonomi masyarakat. Pola relasi yang materialistis dan ekonomis adalah fondasi masyarakat sekaligus mendasari hukum, moral, agama, dan institusi politik kemasyarakatan. Dalam hal ini, Marx membuat dua kategori, tatanan dasar (*base*) dan superstruktur (*superstructure*). Tatanan dasar ini terdiri dari kondisi produksi masyarakat, alat untuk memproduksi, dan pola relasi produksi masyarakat berdasarkan kepemilikan alat-alat produksi.<sup>19</sup>

Pada tahap selanjutnya, menurut Marx, status kepemilikan produksi yang menciptakan pembagian kerja dan kelas-kelas dalam masyarakat, yaitu kelas yang memiliki alat-alat produksi (kelas atas) dan kelas yang tidak memiliki

---

<sup>18</sup> Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda?*, hlm. 76-77.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 79. Lihat pula Yasraf A. Piliang, *Transpolitika: Dinamika Politik di Era Virtualitas*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), hlm. 9.

alat produksi (kelas bawah). Pada gilirannya, kelas-kelas inilah yang menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat.

Gagasan-gagasan Marx ini telah dipakai dalam mengembangkan teori *sosial-konflik*, seperti terdapat dalam asumsi-asumsinya bahwa pola relasi sosial dipandang penuh dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Konflik adalah suatu hal yang tidak bisa dihindarkan dalam semua sistem sosial. Konflik akan terjadi pada aspek pendistribusian sumber daya terbatas, seperti kekuasaan, serta merupakan syarat utama terjadinya perubahan sosial.

Ralf Dahrendorf, tokoh terakhir yang bisa disebutkan mengatakan bahwa masyarakat mempunyai dua wajah, yaitu satu wajah adalah konsensus, dan yang satu lagi adalah konflik. Menurutnya, wajah konsensus adalah *utopia*. Konflik adalah teori yang komprehensif dalam membaca masyarakat. Dahrendorf menegaskan bahwa sifat dasar manusia yang cenderung mementingkan diri sendiri menimbulkan konflik dalam setiap sistem kehidupan.

Namun, berbeda dengan Marx, Dahrendorf ber teori bahwa sumber konflik bukan karena pemilikan dalam sistem produksi, melainkan karena adanya perbedaan kekuasaan, atau antara mereka yang memiliki kekuasaan dan mereka yang tidak atau kurang mempunyai kekuasaan.<sup>20</sup> Kekuasaan dianggap sumber daya terbatas yang dapat menimbulkan konflik sosial, seperti

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 83-84.

kekuasaan dosen dan mahasiswa, pemimpin politik dengan pengikutnya, dan penguasa dengan rakyatnya.

Secara sederhana, itulah ide-ide pokok tentang teori sosial-konflik. Landasan teori ini dipandang cukup untuk menjadi acuan dalam studi ini sehingga penelitian ini dapat mendeskripsikan dan menganalisis sejarah runtuhnya Orde Baru dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi runtuhnya Orde Baru baik secara kultural maupun struktural. Hal itu harus didekati melalui pendekatan historis. Sesuai dengan studi penelitian ini yang bersifat historis, maka di dalamnya akan diungkap peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan sejarah Orde Baru, seperti faktor-faktor penyebab runtuhnya Orde Baru. Selain itu penting pula melihat peta politik umat Islam yang *notabene* sebagai penduduk muslim terbesar di negeri ini dan ikut serta dalam proses kejatuhan Orde Baru, baik yang bersifat individual maupun yang memakai wadah organisasi. Semua itu akan dilihat dari perspektif sosiologi politik, yaitu teori *sosial-konflik*.

#### **F. Metode Penelitian.**

Penelitian ini memerlukan sebuah metode. Metode merupakan hal yang paling urgen untuk mendapatkan pembahasan yang terarah dan mencapai hasil penelitian yang diharapkan. Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah proses pengumpulan data dengan menguji, menganalisis secara kritis, dan menafsirkan suatu gejala peristiwa atau

gagasan yang muncul di masa lalu.<sup>21</sup> Metode sejarah yang dimaksud mencakup beberapa hal berikut.

1. Heuristik

Heuristik merupakan langkah awal dalam penelitian yang mencari dan mengumpulkan data atau sumber yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Penelitian ini adalah penelitian literer yang menggunakan sumber dan dokumen tertulis dalam proses pengumpulan data. Data yang didapat dengan menggunakan penelusuran sumber-sumber literer berupa buku-buku, majalah, jurnal, dan penelusuran internet.

2. Verifikasi.

Dalam tahapan ini kritik sumber dilakukan untuk mengetahui kebenaran data sejarah, baik secara kritik eksteren yang menentukan keaslian maupun kritik intern untuk menentukan kredibilitas apakah sumber-sumber itu benar-benar rasional atau logis<sup>22</sup> dan juga untuk mengetahui relevansi suatu data sejarah dengan objek kajian.

3. Interpretasi.

Dalam tahapan ini dilakukan dengan cara menafsirkan gejala-gejala yang saling berhubungan dengan pokok persoalan yang diteliti. Hal ini diharapkan agar penulisan dapat mencapai pengertian tentang faktor-faktor

---

<sup>21</sup> Louis Gottcalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 32.

<sup>22</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995), hlm 12.



yang menyebabkan terjadinya peristiwa.<sup>23</sup> Apabila terdapat data yang berbeda dalam suatu permasalahan yang sama, penelitian ini membandingkan suatu dengan yang lainnya untuk menentukan mana yang lebih mendekati kebenarannya. Berdasarkan teori yang dipakai penulis mencoba mengolah data berdasarkan tema-tema yang dibahas dan kemudian ditarik kesimpulan untuk melengkapi data-data yang sudah ada. Dalam langkah ini penulis menggunakan pendekatan sosial konflik.

#### 4. Historiografi

Historiografi merupakan penulisan langkah terakhir dari penelitian dengan menghubungkan peristiwa yang satu dengan yang lainnya. Proses ini memperhatikan aspek-aspek kronologi sehingga menjadi sebuah rangkaian sejarah yang berarti. Historiografi ini merupakan penafsiran hasil penelitian yang telah dilakukan. Penyajian berdasarkan tema-tema penting dari setiap perkembangan topik penelitian yang telah dilakukan. Penulis berusaha menyajikan secara sistematis yang tertuang dalam beberapa bab yang saling berkaitan dan saling melengkapi agar lebih mudah dipahami.<sup>24</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

---

<sup>23</sup> Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm 64

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 64.



Penelitian ini dibagi dalam tiga bagian, yaitu: pendahuluan, pembahasan dan kesimpulan, yang kemudian dibagi ke dalam lima bab. Semua bab dibuat sesuai dengan sistematika pembahasan.

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan penelitian secara umum sekaligus sebagai pengantar bagi bagian pembahasan.

Bab kedua berisi sejarah singkat Orde Baru yang di dalamnya memuat periode awal, periode keemasan, dan periode kemunduran dan keruntuhan rezim Orde Baru. Bab ini ditujukan sebagai prawacana menuju inti pembahasan. Selain itu terkait dengan sebuah aksioma bahwa penelitian memerlukan pengetahuan mengenai objek yang diteliti. Karena penelitian ini berkaitan dengan Orde Baru, maka pengetahuan tentangnya diperlukan agar penelitian bersifat komprehensif.

Bab ketiga berisi dinamika politik Islam masa Orde Baru yang meliputi dinamika partai politik Islam dan intelektual muslim. Dinamika politik Islam ini ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai peran politik umat Islam pada masa Orde Baru baik yang memakai bendera partai politik maupun organisasi.

Faktor-faktor runtuhnya Orde Baru yang merupakan inti penelitian ini ditempatkan bab empat. Dalam bab ini dibahas masalah ekonomi, politik, dan disintegrasi sebagai faktor penyebab runtuhnya Orde Baru. Selain itu,

disinggung pula persoalan apakah Islam juga penyebab keruntuhan rezim tersebut atau bukan.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ditujukan untuk mendeskripsikan hasil penelitian. Sementara itu saran-saran dimaksudkan untuk memberikan masukan pada penelitian ini dan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema yang penulis teliti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, ketika rezim Orde Baru runtuh tahun 1998, banyak yang bertanya-tanya apa yang menyebabkan rezim yang telah berkuasa selama 32 tahun itu tumbang. Pertanyaan ini wajar mengemuka karena begitu kokohnya kekuasaan Orde Baru yang ditopang tiga pilar utamanya, yaitu: Golkar, ABRI dan birokrasi.

Dari hasil penelusuran penulis di dapat tiga faktor pemicu untuhnya Orde Baru. Banyak kalangan yang menyebutnya sebagai jalan menuju transisi dari otoritarianisme ke demokrasi, dari Orde Baru ke Reformasi. Tiga faktor itu adalah faktor ekonomi, politik, dan faktor disintegrasi. Ketiganya faktor ini bukanlah hal yang terpisah satu sama salin. Sebaliknya, ketiganya saling berbaitan.

Faktor ekonomi, tepatnya saat krisis ekonomi menerjang Asia, menjadi momentum awal krisis pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Soeharto yang banyak melandaskan legitimasinya pada berbagai pencapaian ekonomi diuji untuk mempertanggungjawabkan propaganda pencapaian tersebut. Ketika krisis tersebut tidak dapat dikendalikan maka akan merembet pada krisis legitimasi.

Krisis ekonomi adalah titik balik pemerintahan Soeharto. Krisis ekonomi merembet ke krisis politik dimana terjadi krisis legitimasi luar biasa, kemudian disusul gerakan *civil society* dengan mahasiswa sebagai dalangnya. Gerakan *civil society* kemudian didukung elit-elit politik yang berposisi dengan Soeharto. Pada

tahap selanjutnya terjadilah pertarungan antara kelompok oposan yang didalangi mahasiswa dengan *status quo*. Di sisi lain, kekuatan Soeharto semakin berkurang. Dukungan ABRI pada pemerintah melemah dan kaum oportunistis yang tadinya berada di lingkaran kekuasaan berbalik arah sekaligus menarik dukungannya terhadap Soeharto.

Konflik politik ini semakin menyudutkan posisi Soeharto. Ditambah lagi dengan tidak tercapainya negosiasi atau kompromi agung yang dilakukan kedua belah pihak. Kuatnya gelombang aksi massa (gerakan *civil society*), dukungan elit-elit oposisi pada gerakan reformasi, keretakan di kalangan elit-elit Soeharto, hingga gagalnya kompromi agung, memaksa Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Pengunduran diri Soeharto menandakan berakhirnya rezim Orde Baru.

Sedangkan disintegrasi di era orde baru berupa ketegangan yang ada di daerah-daerah untuk memisahkan diri dari republik Indonesia. Hal ini terjadi karena ketidakmerataan pembangunan menyebabkan ketidakpuasan, ditambah lagi daerah-daerah yang sesungguhnya memberi sebagian besar kepada pusat, sedangkan daerah-daerah yang bersangkutan hanya menerima kembali sebagian kecil saja dari pendapatan tersebut.

Selain itu, timbul persoalan, apakah agama dalam hal ini Islam menjadi faktor pemicu juga bagi keruntuhan rezim Orde Baru? berdasarkan penelusuran Penulis pula, Islam sebagai simbol-simbol formal tidaklah menjadi pemicu bagi runtuhnya Orde Baru. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa gerakan massa yang berujung pada gagalnya kompromi agung tidak dipicu oleh atas nama

agama, melainkan oleh akumulasi dari berbagai krisis yang sebelumnya terjadi, yakni krisis ekonomi, politik, dan disintegrasi.

## **B. Saran-saran**

Hasil penelitian ini bukanlah karya tulis sempurna. Sebaliknya Penulis masih merasa banyak kekeurangan dalam menyelesaikan penelitian ini. Selain itu, berkaitan dengan tema yang diangkat, Penulis menyarankan beberapa hal, yaitu:

*Pertama*, studi tentang Islam pada masa Orde Baru atau Islam Indonesia pada umumnya perlu terus dilakukan untuk memperkaya wacana dan pustaka. Bagaimanapun Islam pada masa Orde Baru adalah sebuah fakta sejarah. Wawasan tentangnya harus terus hidup agar umat Islam di masa depan dapat belajar dari pengalaman yang telah terjadi.

*Kedua*, penelitian ini hanya mengangkat keruntuhan Orde Baru dari sisi teori sosial konfliknya, dengan menyinggung apakah agama dalam hal ini Islam merupakan pemicu runtuhnya Orde Baru atau tidak. Karena itu, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan kembali untuk memperkaya wacana dan pustakan tentang Islam dan Orde Baru.

*Ketiga*, sebagaimana tampak dari pemaparan di atas bahwa Islam tidak menjadi tidak menjadi penyatu secara langsung bagi gerakan Islam baik secara perorangan maupun organisasi. Di kalangan umat Islam pun terjadi polarisasi dikarenakan berbeda bendera organisasi. Di masa depan, apabila umat Islam hendak menjadi lokomotif perubahan, maka polarisasi gerakan karena lebih mementingkan kepentingan individu atau organisasi tertentu, seperti yang terjadi sebelum Orde Baru runtuh, harus dihindari demi kemajuan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Retowati-KNAP, *Soeharto The Life Legacy Of Indonesia's Second President*, terj. Zamira Lubis, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007.
- Abdurahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Amir Piliang, Yasraf, *Transpolitika: Dinamika Politik di Era Virtualitas*, Yogyakarta: Jalasutra, 2006.
- Arnandt, H. W. (e.d.), *Pembangunan dan Pemerataan, Indonesia di Masa Orde Baru*, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Aziz, Abdul, *Politik Islam Politik: Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Boland, B.J., *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970*, alih bahasa oleh Safroedin Bahar, Jakarta: Grafirti Press, 1985.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi revisi cet. Pertama, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dhakidae, Daniel, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2003.
- Effendi, Bachtiar, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1998).
- Feillard, Andree, *NU Vis-à-vis Negara Pencarian isi, bentuk dan Makna-Islam-organisasi NU*, Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Gottcalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 1986.
- Ismail, Faisal, *Ideologi, Hegemoni, dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif antara Islam dan Pancasila*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Jamal, Raden, "Demokrasi Pada Masa Orde Baru Dalam Konteks Statifikasi Sosial Masyarakat Jawa," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003.
- Karim, M. Abdul, dkk., *Wacana Politik Islam Kontemporer*, Yogyakarta: SUKA Press, 2007.



- Karim, M. Rusli, *Negara dan Peminggiran Islam Politik: Suatu Kajian Menenal Kebijakan Pembangunan Bagi Keberadaan "Islam Politik" di Indonesia Era 1970-an dan 1980-an*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995.
- Latif, Yudi dan Idi Subandy Ibrahim (ed.), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1996.
- Leirissa. R.Z, PRRI-PERMESTA, Jakarta: PT. Pustaka Utama Graffiti, 1991.
- Luhulima, James, *Hari-hari Terpanjang: Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto dan Beberapa Peristiwa Terkait*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Mas'oeed Nasikun, Mohtar, *Sosiologi Politik*, Yogyakarta: PAU-Studi Sosial Universitas Gajah Mada, 1987.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.
- Muhammad, Najib, Supan, K. Sukardiyono, *Suara Amien Rais Suara Rakyat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, Yogyakarta: SIPESS 1992.
- Noer, Deliar, *Ideologi, Politik dan Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Penghidmahan, 1983.
- Rais, Amin, *Islam di Indonesia: Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*, Jakarta: Raja Grasindo Persada, 1994.
- Rasyid, M. Ryaas, *Faktor-faktor Penyebab Disintegrasi Bangsa dan Bubarnya Suatu Negara*, Jakarta: Kompas, 2001.
- Richard Mann, *Memperjuangkan Demokrasi di Indonesia*, Alih Bahasa oleh Maria Irawati Yulianto, SS, Jakarta Handal Niaga Pustaka 1999.
- Ricklefs, M. C., *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004*, alih bahasa oleh Satrio Wahono, Bakar Bifagih, Hasan Huda, Miftah Helmi, Joko Sutrisno, Has Manadi, F. X. Dono Sunardi, dan Haris Priyatna. Jakarta: Serambi, 2008.
- Rizky, Awalil, dan Nasyith Majidi, *Utang Pemerintah Mencekik Rakyat*, Jakarta: E Publishing Company, 2008.

- Rodja, Muhammad, *PPP: Problema dan Prospek*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Produktifitas Jakarta, 1994.
- Saefulloh Fatah, Eef, *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru: Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional*. Bandung: Rosda Karya, 2000.
- Sahdan, Gregorius, *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*, Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2004.
- Salim Sitompul, Agus, *Sejarah Perjuangan HMI 1947-1975*, Surabaya: Bina Ilmu, 1976.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, cet. Ke-1, Jakarta: Modern English Press.
- Sanit, Arbi, *Pergolakan Melawan Kekuasaan: Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik*, Yogyakarta: INSIST Press dan Pustaka Pelajar, 1999.
- Sanit, Arbi, *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan komonis Indonesia*, Jakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1994.
- Soemardjan, Selo, (ed), *Menuju Tata Indonesia Baru*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Soetoro Eko, *Transisi Demokrasi Indonesia: Runtuhnya Rezim Orde Baru*, Yogyakarta: APMD Press, 2003.
- Sularso, ST., *Dialog Dengan Sejarah Seratus Tahun*, Jakarta: Kompas, 2001.
- Sumartana, Th. Elga Sarapung, Zuly Qadir, dan Ahmad Suaedy, *ABRI dan Kekerasan*, Yogyakarta: INTERFIDEI, 1999.
- Supriatna, Nana, *sejarah*, grafindo Media Pratama, 2008.
- Suryadi Culla, Adi, *Patah Tumbuh Hilang Berganti: Sketsa Pergolakan Mahasiswa dalam Politik dan Sejarah Indonesia 1908-1998*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1999.
- Suryadinata. Leo, *Golkar dan Militer*, Jakarta : 1992.

- Tebba, Sudirman, *Islam Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagamaan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Thee Kian Wie, *Pembangunan Kebebasan dan mukjizat Orde Baru*, Jakarta: Kompas, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press.
- Titik Tolak Reformasi: Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*, alih bahasa oleh A. Wisnu Hardana, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Warman Adam, Asvi, *Soeharto File: Sisi Gelap Sejarah Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2006.
- Warnoto, "Politik Hukum Islam Di Indonesia (Studi Komparasi Era, Orde Lama, dan Reformasi)," Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

**Koran dan Majalah:**

*Adil*

*Forum Keadilan*

*Gatra*

*Jawa Pos*

*Kompas*

*Republika*

*Tempo Interaktif*

*Ummat*

**Situs Internet**

<http://www.tempo.interactive.com>

<http://www.hamline.edu>

<http://www.seasite.niu.edu>